



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, guna tertib administrasi dan pengendalian Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.
9. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendapatan:
 

1. tribulan I	Rp957.534.748.384,40
2. tribulan II	Rp714.093.296.941,75
3. tribulan III	Rp871.961.851.941,75
4. tribulan IV	<u>Rp386.847.302.432,10</u>
	Rp2.930.437.199.700,00
  - b. belanja:
 

1. tribulan I	Rp642.170.610.633,00
2. tribulan II	Rp870.983.722.343,00
3. tribulan III	Rp776.466.377.524,00
4. tribulan IV	<u>Rp649.316.489.200,00</u>
	Rp2.938.937.199.700,00
  - c. Pembiayaan:
 

1. tribulan I	Rp8.500.000.000,00
2. tribulan II	Rp0,00
3. tribulan III	Rp0,00
4. tribulan IV	Rp0,00
	<u>Rp8.500.000.000,00</u>

## Pasal 3

- (1) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekapitulasi Anggaran Kas (pendapatan dan penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan) per tribulan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Anggaran Kas pada setiap PD ditetapkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG ANGGARAN KAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN  
 ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	RENCANA REALISASI			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,977,267,739,500.00</b>	<b>713,139,874,360.60</b>	<b>745,327,555,053.00</b>	<b>761,153,880,793.00</b>	<b>757,646,429,293.40</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>475,740,264,648.00</b>	<b>95,148,052,929.60</b>	<b>118,935,066,162.00</b>	<b>118,935,066,162.00</b>	<b>142,722,079,394.40</b>
	Pajak Daerah	145,816,000,000.00	29,163,200,000.00	36,454,000,000.00	36,454,000,000.00	43,744,800,000.00
	Retribusi Daerah	16,927,623,700.00	3,385,524,740.00	4,231,905,925.00	4,231,905,925.00	5,078,287,110.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22,770,083,348.00	4,554,016,669.60	5,692,520,837.00	5,692,520,837.00	6,831,025,004.40
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	290,226,557,600.00	58,045,311,520.00	72,556,639,400.00	72,556,639,400.00	87,067,967,280.00
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2,490,059,334,961.00</b>	<b>617,991,821,431.00</b>	<b>614,924,349,000.00</b>	<b>642,218,814,631.00</b>	<b>614,924,349,899.00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,187,579,296,899.00	546,894,824,000.00	546,894,824,000.00	546,894,824,000.00	546,894,824,899.00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	302,480,038,062.00	71,096,997,431.00	68,029,525,000.00	95,323,990,631.00	68,029,525,000.00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>11,468,139,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,468,139,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Pendapatan Hibah	11,468,139,891.00	0.00	11,468,139,891.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,977,267,739,500.00</b>	<b>713,139,874,360.60</b>	<b>745,327,555,053.00</b>	<b>761,153,880,793.00</b>	<b>757,646,429,293.40</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**JOKO NURSIYANTO**  
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.


YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG ANGGARAN KAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN BELANJA  
 ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	RENCANA REALISASI			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
II	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,118,179,802,400.00</b>	<b>711,309,558,288.00</b>	<b>900,096,738,930.00</b>	<b>842,553,775,445.00</b>	<b>728,307,666,837.00</b>
	<b>Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>2,425,189,916,592.00</b>	<b>569,191,711,688.00</b>	<b>716,472,726,330.00</b>	<b>658,929,762,845.00</b>	<b>480,595,715,729.00</b>
	Belanja Operasi dan Belanja Modal	2,425,189,916,592.00	569,191,711,688.00	716,472,726,330.00	658,929,762,845.00	480,595,715,729.00
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>31,500,000,000.00</b>	<b>31,500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Belanja Tidak Terduga	31,500,000,000.00	31,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>661,489,885,808.00</b>	<b>110,617,846,600.00</b>	<b>183,624,012,600.00</b>	<b>183,624,012,600.00</b>	<b>183,624,014,008.00</b>
	Belanja Bagi Hasil	16,309,922,500.00	4,077,480,600.00	4,077,480,600.00	4,077,480,600.00	4,077,480,700.00
	Belanja Bantuan Keuangan	645,179,963,308.00	106,540,366,000.00	179,546,532,000.00	179,546,532,000.00	179,546,533,308.00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3,118,179,802,400.00</b>	<b>711,309,558,288.00</b>	<b>900,096,738,930.00</b>	<b>842,553,775,445.00</b>	<b>728,307,666,837.00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 JOKO NURSIYANTO  
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.

YUHRONUR EFENDI



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH  
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN  
 ANGGARAN 2022

ANGGARAN PEMBIAYAAN  
 ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	RENCANA REALISASI			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
III	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>140,912,062,900.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>178,637,354,300.00</b>	<b>-21,362,645,700.00</b>	<b>-21,362,645,700.00</b>
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>205,000,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>200,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00	0.00	200,000,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>64,087,937,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,362,645,700.00</b>	<b>21,362,645,700.00</b>	<b>21,362,645,700.00</b>
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	64,087,937,100.00	0.00	21,362,645,700.00	21,362,645,700.00	21,362,645,700.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>140,912,062,900.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>178,637,354,300.00</b>	<b>-21,362,645,700.00</b>	<b>-21,362,645,700.00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



**JOKO NURSIYANTO**  
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.

YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN KAS  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI ANGGARAN KAS PER TRIWULAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Saldo Awal Kas</b>	-	-	<b>6,830,316,072.60</b>	<b>52,061,132,195.60</b>	<b>-29,338,762,456.40</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>475,740,264,648.00</b>	<b>95,148,052,929.60</b>	<b>118,935,066,162.00</b>	<b>118,935,066,162.00</b>	<b>142,722,079,394.40</b>
	Pajak Daerah	145,816,000,000.00	29,163,200,000.00	36,454,000,000.00	36,454,000,000.00	43,744,800,000.00
	Retribusi Daerah	16,927,623,700.00	3,385,524,740.00	4,231,905,925.00	4,231,905,925.00	5,078,287,110.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22,770,083,348.00	4,554,016,669.60	5,692,520,837.00	5,692,520,837.00	6,831,025,004.40
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	290,226,557,600.00	58,045,311,520.00	72,556,639,400.00	72,556,639,400.00	87,067,967,280.00
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2,490,059,334,961.00</b>	<b>617,991,821,431.00</b>	<b>614,924,349,000.00</b>	<b>642,218,814,631.00</b>	<b>614,924,349,899.00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,187,579,296,899.00	546,894,824,000.00	546,894,824,000.00	546,894,824,000.00	546,894,824,899.00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	302,480,038,062.00	71,096,997,431.00	68,029,525,000.00	95,323,990,631.00	68,029,525,000.00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>11,468,139,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,468,139,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Pendapatan Hibah	11,468,139,891.00	0.00	11,468,139,891.00	0.00	0.00
	<b>Pembiayaan Penerimaan</b>	<b>205,000,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>200,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00		200,000,000,000.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan</b>		<b>3,182,267,739,500.00</b>	<b>718,139,874,360.60</b>	<b>945,327,555,053.00</b>	<b>761,153,880,793.00</b>	<b>757,646,429,293.40</b>
<b>Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran</b>		<b>3,182,267,739,500.00</b>	<b>718,139,874,360.60</b>	<b>952,157,871,125.60</b>	<b>813,215,012,988.60</b>	<b>728,307,666,837.00</b>
	<b>BELANJA</b>					
	Dinas Pendidikan	809,570,018,782.00	177,863,935,008.00	197,778,592,185.00	229,099,619,481.00	204,827,872,108.00
	Dinas Kesehatan	321,132,880,250.00	63,194,909,934.00	77,165,932,313.00	85,399,785,177.00	95,372,252,826.00
	Rumah Sakit Daerah Dr. Soegiri	200,303,920,000.00	46,317,905,002.00	54,659,070,870.00	47,013,042,137.00	52,313,901,991.00
	Rumah Sakit Daerah Ngimbang	65,524,514,589.00	13,182,920,562.00	16,346,538,623.00	19,629,322,336.00	16,365,733,068.00
	Dinas PU Bina Marga	219,361,419,725.00	21,936,690,973.00	54,840,354,868.00	65,617,876,917.00	76,966,496,967.00
	Dinas PU Sumber Daya Air	36,931,805,713.00	4,325,874,839.00	9,189,807,772.00	11,803,631,972.00	11,612,491,130.00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	71,678,982,782.00	6,477,882,304.00	14,265,599,573.00	32,128,487,316.00	18,807,013,589.00
	Satuan Polisi Pamong Praaja	13,394,089,623.00	2,830,263,469.00	3,947,757,478.00	3,560,966,908.00	3,055,101,768.00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,816,717,748.00	847,910,138.00	1,354,396,324.00	1,451,449,434.00	1,162,961,852.00
	Dinas Sosial	9,045,377,940.00	1,662,808,724.00	2,746,679,171.00	2,370,462,234.00	2,265,427,811.00

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Tenaga Kerja	7,414,707,937.00	1,532,060,440.00	2,162,235,824.00	2,315,964,966.00	1,404,446,707.00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,455,034,800.00	829,181,551.00	1,173,746,051.00	1,271,574,701.00	1,180,532,497.00
	Dinas Lingkungan Hidup	20,915,777,112.00	5,272,969,877.00	5,107,853,092.00	8,433,150,953.00	2,101,803,190.00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,914,693,840.00	1,547,426,116.00	2,202,670,204.00	2,656,534,349.00	2,508,063,171.00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,146,570,008.00	2,233,577,850.00	2,364,112,600.00	2,103,822,950.00	1,445,056,608.00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	22,568,619,694.00	5,221,970,915.00	7,399,290,717.00	5,608,951,537.00	4,338,406,525.00
	Dinas Perhubungan	36,059,965,797.00	8,507,864,065.00	9,286,838,801.00	9,946,683,609.00	8,318,579,322.00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15,712,174,811.00	3,636,997,969.00	3,674,282,249.00	5,717,647,797.00	2,683,246,796.00
	Dinas Koperasi dan UMK	7,370,382,657.00	1,317,843,800.00	1,970,157,100.00	2,574,659,100.00	1,507,722,657.00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,251,784,083.00	1,166,786,424.00	2,177,008,870.00	1,975,839,778.00	932,149,011.00
	Dinas Pemuda dan Olahraga	16,032,564,861.00	3,384,898,100.00	2,755,882,800.00	8,635,673,250.00	1,256,110,711.00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10,011,695,646.00	2,073,658,188.00	2,871,632,785.00	3,118,582,691.00	1,947,821,982.00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	9,421,112,150.00	1,950,749,834.00	2,492,707,269.00	2,585,314,059.00	2,392,340,988.00


NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Kelautan dan Perikanan	9,975,090,600.00	1,617,949,655.00	2,187,975,711.00	3,717,596,896.00	2,451,568,338.00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59,037,726,087.00	8,701,226,363.00	13,674,206,274.00	20,636,934,070.00	16,025,359,380.00
	Dinas Peternakan	22,663,645,894.00	2,385,567,134.00	3,485,200,512.00	8,523,459,117.00	8,269,419,131.00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,233,584,548.00	1,498,702,256.00	2,429,532,437.00	3,340,310,309.00	3,965,039,546.00
	Inspektorat	12,235,208,274.00	2,639,421,713.00	3,289,745,227.00	3,456,550,077.00	2,849,491,257.00
	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	12,700,913,096.00	2,760,486,550.00	3,444,689,422.00	3,614,347,172.00	2,881,389,952.00
	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	727,822,397,726.00	248,152,361,145.00	279,765,285,679.00	129,774,241,358.00	70,130,509,544.00
	Badan Pendapatan Daerah	17,758,999,381.00	4,111,639,905.00	3,997,080,650.00	4,666,181,850.00	4,984,096,976.00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9,364,861,989.00	2,137,102,996.00	2,945,569,290.00	2,509,947,756.00	1,772,241,947.00
	Sekretariat Daerah	138,677,641,268.00	20,044,753,320.00	37,329,170,468.00	39,574,141,820.00	41,729,575,660.00
	Sekretariat DPRD	74,303,674,187.00	21,495,062,490.00	20,628,570,915.00	19,167,781,010.00	13,012,259,772.00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,894,029,306.00	1,156,218,693.00	3,130,440,366.00	1,812,314,566.00	1,795,055,681.00
	Kecamatan Lamongan	15,197,913,833.00	2,434,833,620.00	4,096,630,156.00	4,394,169,260.00	4,272,280,797.00
	Kecamatan Babat	7,862,193,543.00	1,415,208,385.00	2,155,901,289.00	2,281,612,237.00	2,009,471,632.00

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan Paciran	4,072,272,978.00	722,492,310.00	1,021,155,260.00	1,227,865,930.00	1,100,759,478.00
	Kecamatan Brondong	3,715,990,218.00	687,669,582.00	985,244,410.00	1,080,444,560.00	962,631,666.00
	Kecamatan Turi	2,833,365,675.00	536,281,000.00	824,970,500.00	763,980,500.00	708,133,675.00
	Kecamatan Pucuk	2,938,846,453.00	612,829,730.00	841,129,200.00	844,852,180.00	640,035,343.00
	Kecamatan Sukodadi	2,243,707,089.00	425,522,700.00	592,305,600.00	623,576,300.00	602,302,489.00
	Kecamatan Tikung	2,522,390,636.00	634,143,139.00	813,397,130.00	768,044,335.00	306,806,032.00
	Kecamatan Deket	3,090,499,609.00	624,045,908.00	825,975,892.00	859,122,552.00	781,355,257.00
	Kecamatan Kalitengah	2,076,795,523.00	397,737,186.00	577,625,046.00	531,515,681.00	569,917,610.00
	Kecamatan Kembangbahu	2,763,478,276.00	626,794,507.00	752,222,530.00	761,885,910.00	622,575,329.00
	Kecamatan Mantup	2,166,516,165.00	447,904,851.00	623,100,204.00	684,645,510.00	410,865,600.00
	Kecamatan Modo	2,940,202,000.00	643,970,200.00	784,524,900.00	780,730,200.00	730,976,700.00
	Kecamatan Bluluk	2,310,451,355.00	419,841,200.00	598,974,400.00	679,181,400.00	612,454,355.00
	Kecamatan Karangbinangun	2,321,026,219.00	451,258,107.00	616,072,252.00	648,521,602.00	605,174,258.00

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan Glagah	2,518,918,173.00	490,929,090.00	682,073,437.00	725,659,823.00	620,255,823.00
	Kecamatan Ngimbang	2,625,076,490.00	521,689,572.00	700,573,467.00	729,673,302.00	673,140,149.00
	Kecamatan Sugio	2,921,309,707.00	709,138,737.00	823,089,779.00	755,562,632.00	633,518,559.00
	Kecamatan Karanggeneng	2,484,196,959.00	508,636,082.00	686,231,216.00	704,927,226.00	584,402,435.00
	Kecamatan Sambeng	2,549,789,100.00	516,811,977.00	686,046,868.00	711,341,807.00	635,588,448.00
	Kecamatan Kedungpring	2,863,401,435.00	597,911,467.00	761,175,570.00	800,376,250.00	703,938,148.00
	Kecamatan Laren	2,390,808,215.00	481,337,940.00	749,757,956.00	617,870,340.00	541,841,979.00
	Kecamatan Sekaran	2,588,726,023.00	478,033,635.00	714,237,832.00	769,760,207.00	626,694,349.00
	Kecamatan Sarirejo	2,593,526,627.00	503,059,604.00	700,229,666.00	722,440,566.00	667,796,791.00
	Kecamatan Sukorame	2,478,847,425.00	475,305,123.00	658,447,223.00	691,600,321.00	653,494,758.00
	Kecamatan Solokuro	2,064,707,639.00	391,279,016.00	555,591,827.00	605,530,231.00	512,306,565.00
	Kecamatan Maduran	2,342,262,131.00	537,315,318.00	666,795,130.00	613,389,230.00	524,762,453.00

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b><u>64,087,937,100.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>21,362,645,700.00</u></b>	<b><u>21,362,645,700.00</u></b>	<b><u>21,362,645,700.00</u></b>
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	64,087,937,100.00	0.00	21,362,645,700.00	21,362,645,700.00	21,362,645,700.00
	<b>Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3,182,267,739,500.00</b>	<b>711,309,558,288.00</b>	<b>900,096,738,930.00</b>	<b>842,553,775,445.00</b>	<b>728,307,666,837.00</b>
	<b>Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>	<b>6,830,316,072.60</b>	<b>52,061,132,195.60</b>	<b>-29,338,762,456.40</b>	<b>0.00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
*Joko Nursiyanto*  
**JOKO NURSIYANTO**  
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.

YUHRONUR EFENDI